

Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2021

kerjasama



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



IPB University
— Bogor Indonesia —

Departemen Statistika - FMIPA
Institut Pertanian Bogor

Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2021

Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2021

Ukuran Buku / *Book Size* : A4 29.7 cm × 21.0 cm

Jumlah halaman / *Total size* : 27 halaman / *page*

Naskah / *Manuscript* : Fakultas Matematika dan IPA,
IPB University

Gambar kulit dan Seting / *Cover design and Setting* : Fakultas Matematika dan IPA,
IPB University

Diterbitkan oleh / *Published by* : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2021 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2021 ini menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk yang terjadi di Kota Depok. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan kecemburuan sosial yang lebar dan tajam, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan berbagai masalah.

Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor yang sudah banyak membantu dalam penyusunan buku ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Juga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2021 disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 21 Oktober 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok,



Drs. Manto, M. Si

NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan baru bisa dikatakan berhasil jika tinggi dampaknya dirasakan secara merata oleh pertumbuhan ekonomi yang seluruh lapisan penduduk. Ketimpangan pendapatan antar penduduk memang sangat sulit dihindari, namun ketimpangan yang terjadi harus bisa dikontrol sehingga tidak menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2021 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran bagaimana ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Depok.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain, khususnya Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data utama.

Atas nama Departemen Statistika - FMIPA IPB, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, 21 Oktober 2021

**Ketua Departemen Statistika
FMIPA - Institut Pertanian Bogor**


Dr. Anang Kurnia

NIP. 197308241997021001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ¹	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sumber Data	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi	4
2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok	8
BAB III GINI RATIO KOTA DEPOK	11
3.1. Gambaran Umum Kota Depok	11
3.2. Indeks Gini Kota Depok tahun 2020	16
3.3. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2020	18
3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok tahun 2010-2020	19
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa)	12
Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2021	13
Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	15
Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran	16
Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2021 di Kota Depok	17
Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2021	19
Tabel 7 PDRB Kota Depok 2010-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	21
Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2021	22
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok 2010-2020	23
Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kurva Lorenz	9
Gambar 2 Kurva Lorenz Kota Depok 2021	18
Gambar 3 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	20
Gambar 4 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2021	21
Gambar 5 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum di dalamnya. Siedman (2005) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumber daya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi yang tumbuh dengan sangat baik umumnya juga mendorong terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang memadai bagi penduduknya dan dengan demikian akan menghasilkan wilayah dengan tingkat pengangguran yang kecil.

Meskipun bukan satu-satunya, indikator makro utama yang sering digunakan di berbagai perbincangan mengenai kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya. Pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan keadaan pada waktu atau periode sebelumnya penting untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh suatu pemerintahan telah berjalan dengan efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian

akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan melebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat serta kesenjangan antar daerah. Ketimpangan ini akan menyebabkan kecemburuan sosial dan ekonomi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Depok selama periode 2011-2019 adalah 7.04. Nilai tersebut secara makro dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kuat. Namun dengan adanya pandemik Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020, pemerintah Kota Depok perlu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat meningkat/menurun, apakah ketimpangan antar golongan masyarakat meningkat/menurun pada tahun 2020 ini. Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan alat untuk mengukur ketimpangan tersebut diantaranya dengan menggunakan gini ratio dan Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia.

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis kondisi ketimpangan ekonomi Kota Depok tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio dan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, sehingga akan diperoleh :

- a. Nilai indeks Gini Ratio Kota Depok tahun 2021 beserta kategorinya, dengan disandingkan dengan indeks Gini Ratio Kota Depok tahun-tahun sebelumnya;
- b. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2021 beserta kategorinya, disandingkan dengan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Analisis mengenai hasil yang ada.

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan Gini Ratio Kota Depok tahun 2021 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 khususnya data KOR (data dasar), PDRB Kota Depok 2020, dan Data Jumlah Penduduk Kota Depok

2020. Sumber data tersebut berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Depok dan BPS Pusat.

BAB II METODOLOGI

2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Topik ini adalah masalah di hampir semua negara di dunia dan seringkali orang yang berada dalam kemiskinan memiliki sedikit kesempatan untuk dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Meskipun tentu saja orang yang terlahir dalam kemiskinan tidak otomatis berarti akan tetap miskin. Pendidikan, di semua tingkatan, peningkatan keterampilan, dan kebijakan pelatihan dapat digunakan bersamaan dengan program bantuan sosial untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Terdapat beberapa jenis ketimpangan ekonomi yang bisa disebutkan yaitu antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketidaksetaraan pendapatan adalah sejauh mana pendapatan didistribusikan secara tidak merata dalam sekelompok orang. Pendapatan bukan hanya uang yang diterima melalui pembayaran, tetapi semua uang yang diterima dari pekerjaan (upah, gaji, bonus, dll.), investasi, seperti bunga pada rekening tabungan dan dividen dari saham, tabungan, tunjangan negara, pensiun (negara), pribadi, perusahaan) dan sewa. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan secara individu atau rumah tangga - pendapatan semua orang yang berbagi rumah tangga tertentu. Pendapatan rumah tangga sebelum pajak yang mencakup uang yang diterima dari sistem jaminan sosial dikenal sebagai pendapatan kotor. Pendapatan rumah tangga termasuk semua pajak dan tunjangan dikenal sebagai pendapatan bersih.

2. Ketimpangan Bayaran/Upah

Bayaran/upah seseorang berbeda dengan penghasilan mereka. Bayaran mengacu pada pembayaran dari pekerjaan saja. Ini dapat dilakukan setiap jam, bulanan atau tahunan, biasanya dibayar mingguan atau bulanan dan mungkin juga termasuk bonus. Oleh karena itu, ketimpangan pembayaran menjelaskan perbedaan antara upah orang dan ini mungkin berada dalam satu perusahaan.

3. Ketimpangan Kekayaan

Kekayaan mengacu pada jumlah total aset individu atau rumah tangga. Ini mungkin termasuk aset keuangan, seperti obligasi dan saham, properti dan hak pensiun swasta. Karena itu, ketimpangan kekayaan mengacu pada distribusi aset yang tidak merata dalam sekelompok orang.

Kajian-kajian terdahulu tentang ketimpangan pendapatan telah menemukan beberapa faktor yang berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebagian besar studi menemukan pendidikan menjadi faktor penting yang menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih luas antara si miskin dan si kaya (Chongvilaivan dan Kim 2015; De Silva dan Sumarto 2013). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa akses ke masalah keuangan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan (Wan dan Zhou 2004; Bae, Han, dan Son 2012). Menurut penelitian oleh World Bank (2016), ada beberapa penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia: (i) kesempatan tidak merata, (ii) pekerjaan yang tidak setara, (iii) konsentrasi kekayaan yang tinggi, dan (iv) resiliensi rendah.

Akses yang tidak merata ke pendidikan dapat menimbulkan ketidaksetaraan di masa depan karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung melakukan pekerjaan bergaji rendah, yang biasanya di sektor informal. Perbedaan dalam akumulasi kekayaan juga penting dalam menentukan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi potensi penghasilan anggota rumah tangga di masa depan.

Studi oleh Wicaksono, Amir dan Nugroho (2017) menunjukkan bahwa pendidikan, kekayaan, serta sektor pekerjaan merupakan kontributor signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa

setiap kebijakan yang bertujuan mengurangi akses yang tidak merata ke pendidikan dan keuangan penting untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan di masa depan.

Ada berbagai cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Pilihan ukuran tidak mengubah seperti apa bentuk ketimpangan secara dramatis, namun perubahan ketimpangan dari waktu ke waktu di masing-masing negara dapat terlihat berbeda jika digunakan langkah yang berbeda (The Equality Trust, 2011).

Ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan:

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini mengukur ketimpangan di seluruh masyarakat daripada hanya membandingkan berbagai kelompok pendapatan. Jika semua pendapatan pergi ke satu orang (ketimpangan maksimum) dan semua orang tidak mendapat apa-apa, koefisien Gini akan sama dengan 1. Jika pendapatan dibagi sama rata, dan semua orang mendapatkan sama persis, Gini akan sama dengan 0. Semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin setara masyarakat.

Koefisien Gini dapat mengukur ketimpangan sebelum atau sesudah pajak dan sebelum atau setelah biaya perumahan. Gini akan berubah tergantung pada apa yang diukur. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- $G < 0,3$ → ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ → ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ → ketimpangan tinggi

2. Ukuran Rasio

Ukuran rasio membandingkan berapa banyak orang di satu tingkat distribusi pendapatan dibandingkan dengan orang di tingkat lain. Misalnya, rasio 20:20 membandingkan seberapa kaya 20% orang teratas, dibandingkan dengan 20% terbawah.

Rasio yang umum digunakan antara lain:

- Rasio 50/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian tengah dan bagian bawah dari distribusi pendapatan
- 90/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan bagian bawah
- 90/50 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan tengah
- 99/90 - menjelaskan ketimpangan antara bagian paling atas dan atas

3. Palma Ratio

Palma Ratio adalah rasio bagi hasil dari 10% teratas dengan 40% terbawah. Dalam masyarakat yang lebih setara, rasio ini akan menjadi satu atau lebih rendah, yang berarti bahwa 10% teratas tidak menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional dari 40% terbawah. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, rasionya mungkin sebesar 7.

4. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam 3 kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan dengan dasar pengelompokkan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk

antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah;

- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok

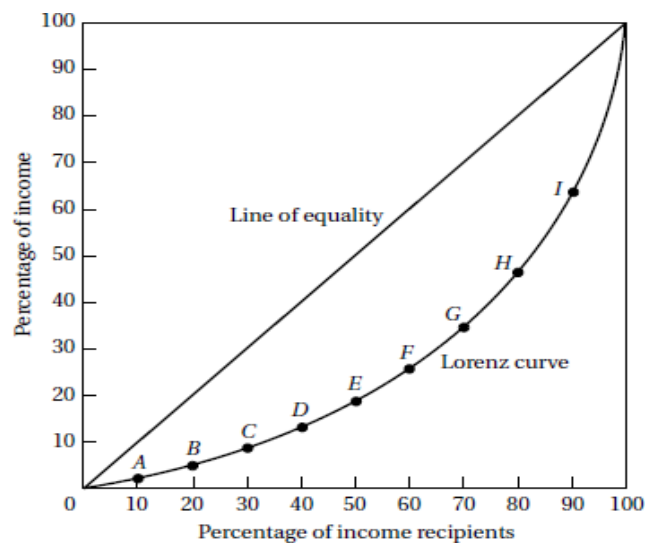
Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Guna mengukur ketimpangan pendapatan per kapita diperlukan data pendapatan, namun karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi data pendapatan.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan suatu ketimpangan sempurna, yang berarti satu orang dalam suatu populasi menguasai semua pendapatan, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Ide dasar perhitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya

pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Untuk menghitung Indeks Gini dibutuhkan kurva Lorenz.

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna membentuk Indeks Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal (Gambar 1 - Kurva Lorenz). Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.



Gambar 1 Kurva Lorenz

Adapun rumus umum Indeks Gini adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n [fp_i(Fc_i + Fc_{i-1})]$$

dimana

$f p_i$: Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_i$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_{i-1}$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $(i-1)$

Cara lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan. Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

dimana

YD_4 : Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan ke $i - 1$

P_i : Persentase kumulatif penduduk ke i

q_i : Persentase pendapatan ke i

BAB III GINI RATIO KOTA DEPOK

3.1. Gambaran Umum Kota Depok

Kota Depok yang merupakan salah satu wilayah termuda di Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 200,30 km². Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang terhubung secara regional dengan kota-kota lainnya. Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif apabila dilihat dari letaknya yang sangat strategis baik dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan yaitu Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo dan Cinere. Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2010 berdasarkan angka sensus 2010 adalah 1.738.570, jumlah penduduk sementara tahun 2020 berdasarkan sensus 2020 adalah 2.056.335. Jumlah penduduk tahun 2021 diproyeksi berdasarkan sp2020 dan supas 2015 sebanyak 2.103.094 jiwa. Sementara jika menurut kelompok umur dan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.061.660 jiwa dan perempuan sebanyak 1.041.434 jiwa (Tabel 1). Jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 sebesar 101,94.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa)

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0 - 4	88.205	83.660	171.865	105,43
5 - 9	85.009	81.648	166.657	104,12
10 - 14	92.626	85.955	178.581	107,76
15 - 19	87.342	82.734	170.076	105,57
20 - 24	83.601	80.990	164.591	103,22
25 - 29	84.853	85.351	170.204	99,42
30 - 34	88.374	90.747	179.121	97,39
35 - 39	88.749	88.635	177.384	100,13
40 - 44	88.648	85.764	174.412	103,36
45 - 49	78.047	75.296	153.343	103,65
50 - 54	65.399	63.406	128.805	103,14
55 - 59	50.037	50.061	100.098	99,95
60 - 64	35.038	36.137	71.175	96,96
65 - 69	23.760	25.102	48.862	94,65
70 - 74	12.315	13.800	26.115	89,24
75+	9.657	12.148	21.805	79,49
Jumlah	1.061.660	1.041.434	2.103.094	101,94

Keterangan: hasil perhitungan

Tabel 2 memberikan gambaran mengenai proyeksi pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Depok untuk tahun 2021. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok 10 persen terbawah adalah sejumlah Rp. 711.313,9 per kapita per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 408.473,5 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 865.405,9 per orang setiap bulannya. Besaran pengeluaran meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Rata-rata pengeluaran pada kelompok 10 persen teratas adalah sebesar Rp. 6.741.850 per kapita per bulan, melonjak hampir 1.7 kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran di bawahnya yang sebesar Rp. 3.985.724 per orang per bulan. Pengeluaran minimum pada

kelompok ini tercatat sebesar Rp. 4.661.665 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 31.401.770 per orang setiap bulannya.

Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2021

No	Kelompok Pengeluaran (Rp)	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			
		Rata-rata (Rp)	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)	Simpangan Baku (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<=865.405,9	711.313,9	408.473,5	865.405,9	99.078,3
2	865.405,9 - 1.170.874	1.014.863	865.405,9	1.170.874	85.418,73
3	1.170.874 - 1.392.151	1.299.972	1.170.874	1.392.151	70.012,18
4	1.392.151 - 1.642.529	1.511.978	1.392.151	1.642.529	72.619,20
5	1.642.529 - 1.975.472	1.839.972	1.642.529	1.975.472	102.263,30
6	1.975.472 - 2.355.802	2.183.673	1.975.472	2.355.802	112.474,10
7	2.355.802 - 2.789.739	2.575.287	2.355.802	2.789.739	128.967,60
8	2.789.739 - 3.461.843	3.117.395	2.789.739	3.461.843	193.150,70
9	3.461.843 - 4.661.665	3.985.724	3.461.843	4.661.665	317.077,70
10	>=31.401.770	6.741.850	4.661.665	31.401.770	3.159.022,70

Keterangan: hasil proyeksi

Salah satu indikator perekonomian dalam suatu wilayah adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan komposisi PDRB menurut sektoral dapat diketahui struktur perekonomian suatu wilayah. Sedangkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari waktu ke waktu menunjukkan besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya proyeksi PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku tahun 2020 ialah Rp. 70.580.213 sementara pada tahun 2021 diproyeksi sekitar Rp. 71.017.810. Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar dihasilkan oleh kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta kategori konstruksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi yang ada. Bagi setiap daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah

dicapai, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang (BPS, 2001). Perekonomian Kota Depok tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis akibat pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2020 mencapai -1.92 persen, hal ini tidak hanya terjadi di kota Depok namun terjadi pada kota maupun kabupaten di Jawa Barat (Kota Depok Dalam Angka 2021). Sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia pada awal Maret 2020, kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan dan tidak terkecuali perekonomian di Kota Depok. Secara umum, pandemi COVID-19 terbukti telah menahan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Indonesia sejak triwulan I 2020. Bank Dunia atau World Bank memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 berada pada level 4,4% (year on year/yoy) lebih baik dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berada pada kisaran -2,0 s.d. -1,6 persen (year on year). Sementara perkiraan pemerintah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 yaitu antara 4.5% dan 5.5%. (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Sehingga laju pertumbuhan PDRB Kota Depok tahun 2021 diprediksi juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk menurut lapangan usaha dan kelompok pengeluaran pada tahun 2021. Sebagian besar penduduk pada kelompok 10 persen pengeluaran terbawah dan kelompok 10 persen pengeluaran teratas menjadikan sektor jasa dan lainnya sebagai lapangan usahanya. Sektor Perdagangan, hotel, dan rumah makan merupakan lapangan usaha tertinggi kedua dari kedua kelompok pengeluaran dengan masing-masing persentasenya adalah 27,42% untuk kelompok 10 persen pengeluaran terendah dan 15,21 persen untuk kelompok 10 persen pengeluaran teratas. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan penggalian menjadi lapangan usaha paling rendah di antara semua sektor lapangan usaha yang ada.

Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

Lapangan Usaha	Kelompok Pengeluaran (Rp)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Pertanian	13,55	5,24	19,55	15,49	15,06	10,46	23,26	23,88	20,20	21,12
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,74	0,95
Industri Pengolahan	7,90	14,30	8,21	5,44	12,28	5,81	2,42	5,60	4,36	5,89
Listrik dan Gas	1,34	0,00	1,81	2,06	0,00	1,89	0,00	3,58	0,00	0,78
Konstruksi/bangunan	11,87	5,52	12,63	2,85	10,97	14,19	5,69	5,72	5,44	2,62
Perdagangan, hotel, dan rumah makan	27,42	29,63	21,86	27,92	25,92	20,87	26,79	16,59	15,67	15,21
Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi	15,59	20,47	12,00	20,10	10,53	6,76	11,39	10,75	4,93	9,48
Keuangan dan asuransi	0,00	0,00	0,88	2,89	1,59	2,83	3,76	7,77	5,36	2,71
Jasa dan lainnya	22,33	24,84	23,07	23,25	23,64	35,52	26,70	26,12	43,30	41,25
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: hasil proyeksi

Pendidikan merupakan salah satu peubah yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah kesenjangan. Hal tersebut karena investasi pada sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan. Tabel 4 menyajikan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran dan tingkat Pendidikan. Untuk kelompok pengeluaran 10 persen terendah terlihat bahwa kelompok ini mayoritas adalah penduduk dengan tingkat Pendidikan tertinggi adalah SLTA/ sederajat. Hanya sekitar 2,85 persen penduduk pada kelompok pengeluaran ini yang berpendidikan universitas.

Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	<SD	SD/ sederaja	SMP/ sederaja	SLTA/ sederaja	Universitas	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
<=865.405,9	1,28	33,46	16,11	46,30	2,85	100
865.405,9 - 1.170.874	2,51	27,83	14,49	44,78	10,39	100
1.170.874 - 1.392.151	2,50	22,09	17,24	49,94	8,22	100
1.392.151 - 1.642.529	0,00	24,74	15,99	48,82	10,45	100
1.642.529 - 1.975.472	0,00	22,90	13,66	48,40	15,04	100
1.975.472 - 2.355.802	0,00	19,76	14,60	43,69	21,95	100
2.355.802 - 2.789.739	0,00	15,63	10,19	53,26	20,93	100
2.789.739 - 3.461.843	0,00	5,87	10,54	44,24	39,35	100
3.461.843 - 4.661.665	0,00	9,37	7,93	35,49	47,20	100
>=31.401.770	0,00	2,28	5,94	31,56	60,22	100

Sebaliknya pada kelompok pengeluaran 10 persen teratas, Sebagian besar penduduk merupakan tamatan SLTA/ sederajat dan Universitas. Pada kelompok ini, 31,56 persen merupakan tamatan SLTA/ sederajat dan 60,22 persen merupakan tamatan universitas. Namun ada sekitar 2,28 persen tingkat pendidikan SD/ sederajat pada kelompok pengeluaran ini, dan 5,94 persen untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat.

3.2. Indeks Gini Kota Depok tahun 2021

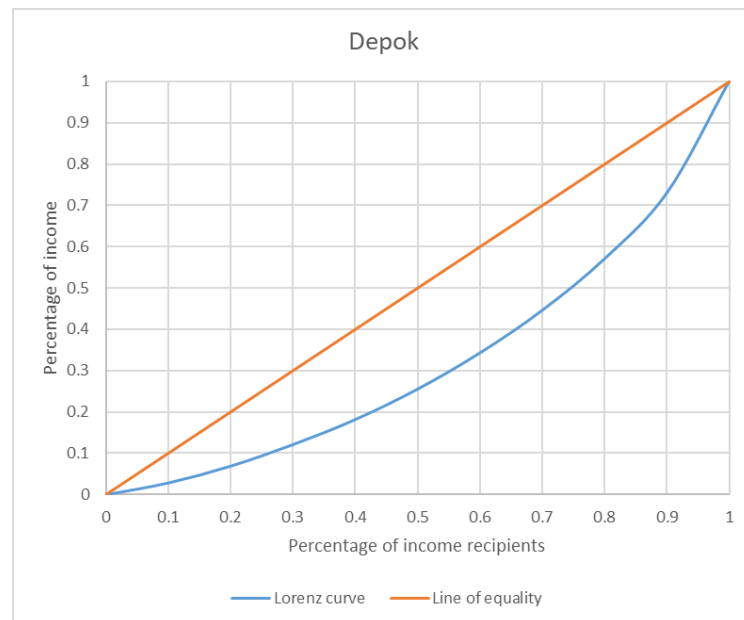
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kota Depok tahun 2021, ada sekitar 212.020 jiwa dari jumlah penduduk Kota Depok yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah berada di Rp. 711.314. Sedangkan ada 209.031 jiwa yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi berada di Rp. 6.741.850 (Tabel 5).

Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2021 di Kota Depok

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_{c-1}]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=865.405,9	711.314	212.020	0,100813373	150.812.773.078	0,028753	
865.405,9 - 1.170.874	1.014.863	209.424	0,099579001	212.536.627.027	0,040521	0,00976151
1.170.874 - 1.392.151	1.299.972	211.756	0,100687844	275.276.870.832	0,052483	0,01923461
1.392.151 - 1.642.529	1.511.978	209.776	0,099746374	317.176.675.950	0,060471	0,03032156
1.642.529 - 1.975.472	1.839.972	208.871	0,099316055	384.316.770.725	0,073272	0,04347363
1.975.472 - 2.355.802	2.183.673	212.139	0,100869956	463.242.270.189	0,088320	0,06045357
2.355.802 - 2.789.739	2.575.287	209.643	0,099683134	539.890.913.505	0,102933	0,07880696
2.789.739 - 3.461.843	3.117.395	210.955	0,100306976	657.629.998.939	0,125381	0,10220163
3.461.843 - 4.661.665	3.985.724	209.479	0,099605153	834.925.561.588	0,159183	0,12983058
>=31.401.770	6.741.850	209.031	0,099392134	1.409.255.626.447	0,268682	0,17207937
Jumlah		2.103.094	1,000000	5.245.064.088.280	1,000000	0,64616342
Gini Ratio 2021	0,35384					

Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Kota Depok pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,354. Dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2019 (0,344) dan 2020 (0,342), maka Indeks Gini Kota Depok mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik, Maret 2021 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,384 sehingga kondisi ketimpangan di Kota Depok lebih rendah dibandingkan Nasional. Namun Indeks Gini Kota Depok tahun 2021 ini, masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan

kurva Lorenz Kota Depok untuk tahun 2021 ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 2).



Gambar 2 Kurva Lorenz Kota Depok 2021

3.3. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok Tahun 2021

Salah satu kriteria kesenjangan yang diukur oleh Bank Dunia adalah dengan melihat persentase pengeluaran yang dilakukan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran di suatu wilayah. Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40% kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20% kelompok berpendapatan tinggi.

Jika ketimpangan dilihat berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada Tahun 2021 di Kota Depok kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 18,2% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 842.976 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 1.134.532.

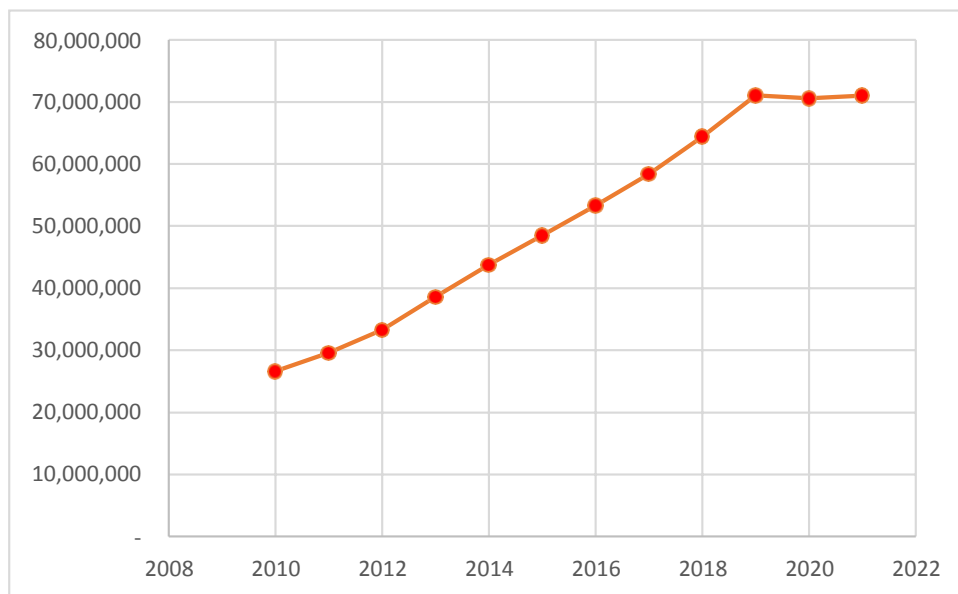
Kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 39 % dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 841.608 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 2.429.082. Sementara kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 42,8% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 418.510 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 5.363.787 (Tabel 6). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kota Depok berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2021 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Jiwa)	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	842.976	1.134.532	956.382.952.190	18,2
40% menengah	841.608	2.429.082	2.044.334.633.454	39,0
20% teratas	418.510	5.363.787	2.244.798.560.147	42,8
Total	2.103.094	8.927.401	5.245.516.145.791	100

3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2010-2021

Jumlah penduduk Kota Depok pada periode 2010-2020 berkisar antara 1.749.494 jiwa (tahun 2010) sampai dengan 2.103.094 jiwa (tahun 2021). Berdasarkan data yang dipublikasi BPS Kota Depok (Kota Depok dalam Angka 2021), tahun 2020 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10,267 penduduk per km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 14,986 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 6,832 jiwa/km².



Catatan : PDRB 2020 dan 2021 hasil proyeksi

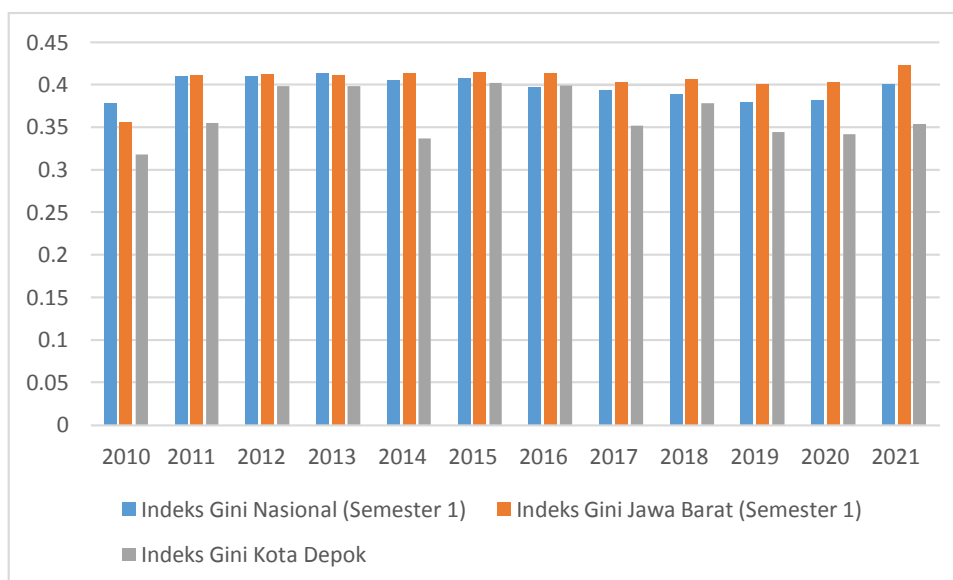
Gambar 3 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tabel 7 menyajikan PDRB Kota Depok pada periode 2010-2021 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah). Pada periode tersebut, selain pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan nilai minimum sebesar Rp. 26.601.854 pada tahun 2010, dan nilai maksimum sebesar Rp. 71.041.986 pada tahun 2019 (Gambar 3). Peningkatan PDRB pada periode 2010-2019 berfluktuasi pada kisaran 9.52% (tahun 2016-2017) sampai dengan 16.05% (tahun 2012-2013). Meskipun pada tahun 2020 diperkirakan terjadi penurunan PDRB dari tahun 2019 sebesar 0.65%, namun secara umum pada periode 2010-2021, PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 10.33%. Secara rata-rata, PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada periode 2010-2021 adalah sebesar Rp. 50.765.753.

Tabel 7 PDRB Kota Depok 2010-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
[1]	[2]
2010	26.601.854
2011	29.594.665
2012	33.283.562
2013	38.627.196
2014	43.806.035
2015	48.532.645
2016	53.331.051
2017	58.408.777
2018	64.363.244
2019	71.041.986
2020*	70.580.213
2021*	71.017.810

Catatan : *hasil proyeksi



Gambar 4 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2021

Tabel 8 menampilkan Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok pada periode 2010-2021. Terlihat bahwa pada periode tersebut, kecuali pada tahun 2016 yang sedikit di atas Nasional, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun provinsi Jawa Barat (Gambar 4). Khusus di Kota Depok, Indeks Gini tersebut berfluktuasi pada kisaran 0.318 (tahun 2010) sampai dengan 0.402 (tahun 2015). Pada periode 2010-2021, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0.365, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0.397) dan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat (0.406). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2010-2021 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Khususnya dalam empat tahun terakhir, terjadi penurunan Indeks Gini di Kota Depok artinya ada perbaikan pemerataan pendapatan di Kota Depok, meskipun pada tahun 2021 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020.

Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2021

Tahun	Indeks Gini Nasional (Semester 1)	Indeks Gini Jawa Barat (Semester 1)	Indeks Gini Kota Depok
[1]	[2]	[3]	[4]
2010	0,378	0,356	0,318
2011	0,410	0,411	0,355
2012	0,410	0,412	0,398
2013	0,413	0,411	0,398
2014	0,406	0,413	0,337
2015	0,408	0,415	0,402
2016	0,397	0,413	0,399
2017	0,393	0,403	0,352
2018	0,389	0,407	0,378
2019	0,380	0,400	0,344
2020	0,381	0,403	0,342
2021	0,401	0,423	0,354

Sumber : BPS, diolah

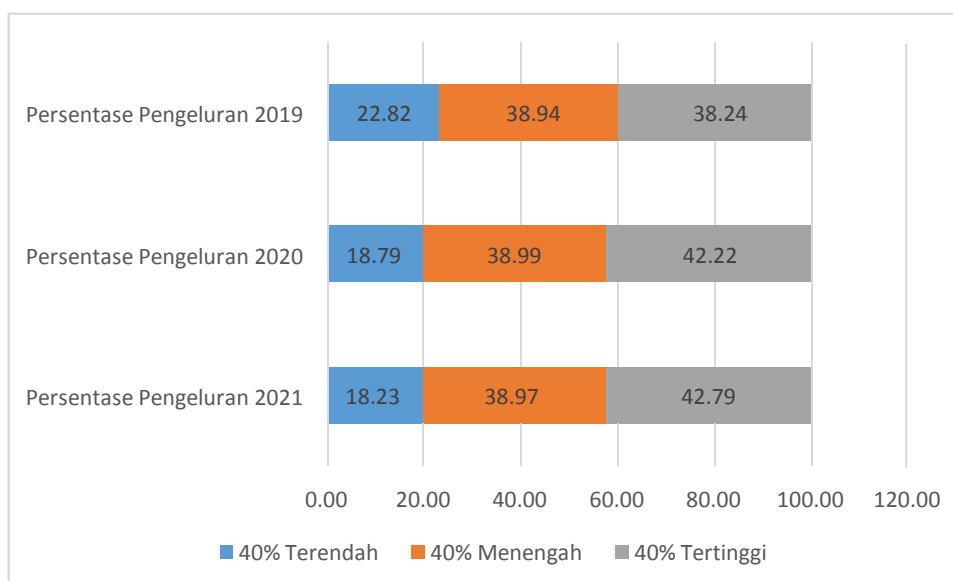
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok 2010-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	Gini Ratio
[1]	[2]	[3]
2010	6.36	0.318
2011	6.81	0.355
2012	8.06	0.398
2013	6.85	0.398
2014	7.28	0.337
2015	6.63	0.402
2016	7.28	0.399
2017	6.75	0.352
2018	6.97	0.378
2019	6.74	0.344
2020	-1.92	0.342

Sumber: BPS Kota Depok

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan dua hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian baik peneliti sosial maupun ekonomi, hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Selama tahun 2010-2019 (Tabel 9), pertumbuhan ekonomi Kota Depok cukup tinggi (selalu di atas 6 persen dan angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun pada tahun 2020, berdasarkan Buku Kota Depok dalam angka 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Depok terjadi pada titik terendah yaitu -1.92. Hal ini terjadi karena efek pandemi COVID-19 dan hampir di seluruh kota di Indonesia pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama periode 2010-2019 yang tinggi masih disertai dengan adanya ketimpangan begitu juga ketika terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak

dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas atau belum inklusif.



Gambar 5 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia

Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2019-2021

Kelompok Pengeluaran	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
[1]	[2]	[3]	[4]
Rata-rata pengeluaran 2019	1.034.562	2.159.448	4.607.661
Rata-rata pengeluaran 2020	1.040.702	2.160.524	4.695.163
Rata-rata pengeluaran 2021	1.134.531	2.429.081	5.363.787

Gambar 5 menyajikan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok untuk tiga tahun terakhir (2019 - 2021). Kelompok pengeluaran 40% terendah pada tahun 2021, persentase pengeluarannya terkecil dibandingkan tahun 2019 dan 2020 Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

untuk kelompok pengeluaran ini berturut-turut dari tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah Rp. 1.034.562, Rp. 1.040.702 dan Rp.1.134.531 (Tabel 10). Terlihat adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara untuk 20% teratas, persentase pengeluaran tahun 2021 berada lebih besar dibandingkan dua tahun lainnya. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran teratas ini, rata-rata tertinggi ada pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 5.363.787, sementara pada tahun 2020 ada pada angka Rp. 4.695.163. Berdasarkan perbandingan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk selama tiga tahun terakhir lebih dari 17%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) Indeks Gini Kota Depok Tahun 2021 sebesar 0.354 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang.
- b) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% terendah di Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 18.2%, sehingga tergolong pada ketimpangan rendah.
- c) Berdasarkan Indeks Gini di Kota Depok pada periode 2010-2021, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Meskipun Indeks Gini 2021 Kota Depok diproyeksi lebih tinggi 0.012 poin dibandingkan tahun 2020.
- d) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, selama periode 2019 sampai dengan 2021, di Kota Depok selalu berada pada tingkat ketimpangan rendah.

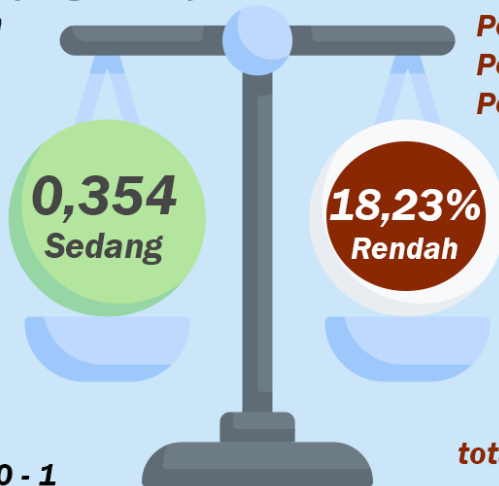
4.2. Saran

- a) Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama tahun 2010-2019 cukup tinggi, yang selalu di atas 6 persen, sementara mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 efek dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Depok masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, sehingga pembangunan Kota Depok harus lebih fokus memperhatikan *inclusive growth* dari pada pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b) Pemerintah Kota Depok hendaknya mengembangkan berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh dari hasil-hasil pembangunan.

LAMPIRAN

Gini Ratio Kota

Ukuran Ketimpangan Masyarakat Berdasarkan Pendapatan



Kriteria

Persentase < 12% --> Tinggi
 Persentase 12% - 17% --> Sedang
 Persentase > 17% --> Rendah

Nilai antara 0 - 1

$G < 0,3$ --> Rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ --> Sedang
 $G > 0,5$ --> Tinggi

Persentase pengeluaran penduduk berpendapatan 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk

Ukuran Bank Dunia

Ukuran Ketimpangan Tahun 2021

Sumber : Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Dan Kecamatan Tahun 2021

Gini Ratio Kecamatan

0,412 Sedang	Cinere	15,66% Sedang	0,33 Sedang	Cipayung	19,68% Rendah
0,393 Sedang	Cimanggis	16,11% Sedang	0,326 Sedang	Pancoran Mas	20,22% Rendah
0,37 Sedang	Bojongsari	20,75% Rendah	0,287 Rendah	Tapos	21,57% Rendah
0,364 Sedang	Sawangan	19,65% Rendah	0,265 Rendah	Cilodong	22,68% Rendah
0,335 Sedang	Beji	19,25% Rendah	0,24 Rendah	Limo	25,96% Rendah
0,332 Sedang	Sukmajaya	19,17% Rendah			

Ukuran Bank Dunia

Diolah oleh : Diskominfo Kota Depok

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*. 1–20
- de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kememparekraf. 2014. *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- The Equality Trust. 2011. "Income inequality: Trends and Measures." *Equality Trust Research Digest*; no.2: pp.1–8
- Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). *WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)*.
- Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. *ADB Working Paper Series*.
- World Bank. 2016. *Indonesia's rising divide*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesia-rising-divide>



Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Depok

Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota

Depok Lantai 7 Jl. Margonda Raya No. 54

Depok

Telp. (021) 29402276 dan (021) 7764410

Email: diskominfo@depok.go.id